

## Judul Peran Transparansi dan Akuntabilitas Kertas Kerja Audit terhadap Laporan Audit

Putri Fahila \*<sup>1</sup>  
Syifa Berliana Gunawan <sup>2</sup>  
Hanny Aisya Gusti Maharani <sup>3</sup>  
Shinta Deviana <sup>4</sup>  
Annisah Hidayati <sup>5</sup>  
Evva Nur Aliyah <sup>6</sup>  
Zahra Ayu Fadillah <sup>7</sup>  
Farah Amalia <sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Program Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

\*e-mail: [pfahila@gmail.com](mailto:pfahila@gmail.com)<sup>1</sup>, [syifaberlianag@gmail.com](mailto:syifaberlianag@gmail.com)<sup>2</sup>, [hannyaisya57@gmail.com](mailto:hannyaisya57@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[devianashinta25@gmail.com](mailto:devianashinta25@gmail.com)<sup>4</sup>, [annisahhidayati7@gmail.com](mailto:annisahhidayati7@gmail.com)<sup>5</sup>, [evvanur04@gmail.com](mailto:evvanur04@gmail.com)<sup>6</sup>  
[zahraayufdllh@gmail.com](mailto:zahraayufdllh@gmail.com)<sup>7</sup>, [farhasjmi@walisongo.ac.id](mailto:farhasjmi@walisongo.ac.id)<sup>8</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas kertas kerja pemeriksaan terhadap laporan audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi di Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa transparansi KKP terindikasi dari penyusunan yang terstruktur, dokumentasi yang lengkap serta akses informasi yang memadai antar tim audit. Sementara itu, Akuntabilitas diterapkan melalui pengasan tanggung jawab yang jelas, penerapan review berjenjang, dan tanggung jawab auditor atas kesimpulan yang dihasilkan. Kualitas penyusunan KKP yang baik turut mendukung proses audit yang sistematis dan sesuai standar. Secara keseluruhan, transparansi dan akuntabilitas dalam KKP berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan audit

**Kata kunci:** *Transparansi, akuntabilitas, kertas kerja pemeriksaan, laporan audit*

### Abstract

This study aims to analyze the application of transparency and accountability in audit working papers to audit reports. This study uses a qualitative approach with observation methods in a Public Accounting Firm (KAP). The results show that transparency in KKP is indicated by structured preparation, complete documentation, and adequate access to information between audit teams. Meanwhile, accountability is implemented through clear supervision of responsibilities, the implementation of hierarchical reviews, and the auditor's responsibility for the conclusions produced. The quality of KKP preparation also supports a systematic and standardized audit process. Overall, transparency and accountability in KKP play a significant role in improving the quality and credibility of audit reports

**Keywords:** *Transparency, accountability, audit working papers, audit reports*

## PENDAHULUAN

Audit laporan keuangan merupakan salah satu proses penting dalam memastikan informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas benar, akurat, dan dapat dipercaya. Melalui proses ini, auditor independen memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar serta bebas dari kesalahan yang material, baik yang terjadi karena kekeliruan maupun kondisi tertentu. Dalam praktiknya, kualitas audit sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan ketepatan dokumentasi audit, salah satunya melalui kertas pemeriksaan kerja (KKP). KKP menjadi sarana penting bagi auditor untuk mencatat seluruh prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, serta temuan yang dihasilkan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan opini audit. (Maisyarah, 2019)

Selain berfungsi sebagai alat dokumentasi, KKP juga mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses audit. Transparansi dalam KKP terlihat dari sejauh mana proses audit dapat ditelusuri dan dipahami oleh pihaklain, sementara akuntabilitas berkaitan dengan

tanggung jawab auditor terhadap setiap langkah dan keputusan yang diambil selama proses audit berlangsung. Oleh karena itu, penyusunan KKP yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil audit sekaligus memperkuat kualitas laporan audit yang dihasilkan. (Vica & Budiwitjacksono, 2025)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosita Farhat dan Munari (2024) lebih menitikberatkan pada salah satu bagian KKP, yaitu top schedule, dalam audit laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan top schedule dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit serta memudahkan auditor dalam mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi. Namun penelitian tersebut masih terbatas pada satu komponen KKP saja dan belum membahas secara menyeluruh bagaimana peran KKP dari sisi transparansi dan akuntabilitas dalam mempengaruhi kualitas laporan audit secara keseluruhan. Di sisi lain juga mengungkap adanya kendala dalam penerapan KKP, seperti keterbatasan waktu, kompleksitas format, serta ketidaksesuaian dalam penyusunan dokumen audit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KKP memiliki peran yang penting, masih terdapat aspek-aspek yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana transparansi dan akuntabilitas KKP secara menyeluruh dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan. (Farhat & Munari, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian, di mana penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu bagian KKP, yaitu top schedule, dan belum mengkaji peran KKP secara komprehensif dari aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan audit. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam kertas kerja pemeriksaan secara keseluruhan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan audit.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi keterbatasan penelitian terdahulu dengan memperluas fokus penelitian, tidak hanya pada satu jenis KKP, tetapi pada keseluruhan proses penyusunan KKP yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami peran transparansi serta akuntabilitas kertas kerja pemeriksaan dalam meningkatkan kualitas laporan audit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas praktik audit melalui penyusunan KKP yang lebih transparan dan akuntabel.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati secara langsung proses dan aktivitas dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan, sehingga peneliti dapat menggambarkan perilaku auditor berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena dalam konteks tertentu secara deskriptif dan interpretatif, dengan menitikberatkan pada pemahaman makna, persepsi, serta konteks sosial partisipan.

Subjek penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Semarang yang dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis peran akuntabilitas dan transparansi dalam kertas kerja pemeriksaan terhadap laporan audit.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati proses penyusunan kertas kerja pemeriksaan meliputi prosedur audit, pengumpulan bukti, serta penyusunan laporan audit. Sementara dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen terkait kertas kerja pemeriksaan sebagai data pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Transparansi dalam Kertas Kerja Audit (KKP)**

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola organisasi maupun dalam pengelolaan keuangan. Secara umum, transparansi dapat dipahami sebagai

keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan, jelas, dan dapat diakses oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Melalui transparansi, Masyarakat atau para pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana suatu organisasi menjalankan kegiatannya serta bagaimana sumber daya yang dikelola. Oleh karena itu, transparansi sering dikaitkan dengan upaya meningkatkan kepercayaan public terhadap suatu organisasi atau Lembaga.

Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, Kertas Kerja Audit (KKP) disusun secara terstruktur dan mengikuti urutan tahapan audit yang ada. Penyusunannya dilakukan dari tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian audit, sehingga alurnya jelas dan mudah ditelusuri kembali (traceable). Agar lebih mudah dalam menelusuri baik proses maupun bukti, bisa dilakukan dengan pembuatan indeks dan juga merincikan lokasi dari bukti bukti audit yang digunakan sebagai bukti pendukung. Dengan susunan yang seperti ini, auditor maupun reviewer tidak kesulitan dalam memahami alur pekerjaan maupun mencari dokumen pendukung yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan KKP sudah mencerminkan adanya transparansi dalam proses audit.

Selain itu, penyusunan KKP yang terstruktur juga membantu mempermudah proses review. Auditor senior bisa lebih cepat melihat bagian-bagian penting dan melakukan pengecekan atas prosedur yang sudah dilakukan. Sehingga potensi kesalahan dapat ditekan dan proses audit tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini sejalan dengan (Maisyarah, 2019) yang menyatakan bahwa kertas kerja audit perlu disusun secara teratur dan mudah dipahami agar dapat mendukung kualitas serta kredibilitas hasil audit.

Melanjutk dari penyusunan KKP yang sudah terstruktur, dari hasil observasi terlihat bahwa setiap prosedur audit sudah dicatat dengan jelas dan cukup rinci. Mulai dari tujuan pemeriksaan, langkah-langkah yang dilakukan, sampai dengan hasil yang diperoleh selama proses audit. Dengan adanya pencatatan yang seperti ini, proses audit menjadi lebih terbuka karena setiap pekerjaan yang dilakukan bisa dilihat dan dipahami oleh pihak lain secara objektif.

Selain itu, dokumentasi yang lengkap juga dapat memperkuat transparansi dikarenakan setiap temuan audit dapat ditelusuri kembali dan dicek berdasarkan bukti yang ada. Jadi, tidak ada bagian dari proses audit yang terkesan tertutup atau sulit dipahami. Hal ini sejalan dengan pendapat (S. N. Putri & Budiwitjaksono, 2025) yang menyatakan bahwa dokumentasi audit harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dokumentasi yang rinci dalam KKP menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung transparansi sekaligus meningkatkan keandalan hasil audit.

Selain dari penyusunan dan dokumentasi, transparansi juga terlihat dari bagaimana informasi terbuka dan dapat diakses oleh semua tim audit. Setiap anggota tim dapat mengakses KKP yang dibutuhkan sesuai dengan tanggung jawabnya. Hal tersebut juga dapat memperlancar koordinasi dalam tim karena informasi bisa langsung diperoleh tanpa harus menunggu penjelasan dari pihak lain. Situasi ini juga membuat komunikasi antar anggota tim lebih terbuka, terutama saat membahas temuan dari data atau bukti yang diperoleh atau kendala selama proses audit. Setiap anggota tim bisa memberikan pendapat atau klarifikasi berdasarkan data yang ada, sehingga keputusan yang diambil jadi lebih tepat (Anggraini et al., 2025) menyatakan bahwa kertas kerja audit perlu dapat diakses dan dipahami oleh tim audit sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Dengan demikian, keterbukaan informasi dalam tim audit menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga transparansi sekaligus meningkatkan kualitas hasil audit secara keseluruhan.

Secara umum, transparansi dalam Kertas Kerja Audit (KKP) terlihat cukup berpengaruh terhadap kelancaran dan kualitas audit. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan yang rapi, dokumentasi yang jelas, serta keterbukaan informasi antar anggota dalam tim audit, sehingga proses review jadi lebih mudah dilakukan dan tidak membingungkan. Auditor senior maupun pihak lain yang berkepentingan juga bisa lebih cepat memahami alur pengerjaan dan melakukan pengecekan tanpa banyak kendala. Selain itu, setiap proses audit yang sudah didokumentasikan dengan baik dapat ditelusuri kembali dan dicek ulang kapan pun dibutuhkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur audit benar-benar sudah dijalankan sesuai dengan

standar yang berlaku. Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam proses audit bisa diminimalisir.

## 2. PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM KKP

Akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan dengan kewajiban individu maupun organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, Keputusan, serta pengelolaan sumber daya kepada pihak yang memiliki kepentingan. Dalam konteks organisasi, akuntabilitas menunjukkan adanya tanggungjawab atas pelaksanaan tugas serta hasil yang dicapai. Menurut Manggaukang (2020), akuntabilitas dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan yang memuaskan *satisfactory report* secara berkala mengenai tindakan yang telah dilakukan maupun kegagalan dalam menjalankan wewenang yang dimiliki.

Akuntabilitas dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) merupakan dasar penting karena menjamin bahwa hasil audit dapat dipercaya, transparan, dan berkualitas. KKP tidak hanya berfungsi sebagai catatan prosedur audit, tetapi juga sebagai bukti bahwa auditor telah mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada berbagai pihak, seperti pimpinan instansi, pemerintah, dan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di Kantor Akuntan Publik (KAP), penerapan akuntabilitas dalam KKP ternyata sudah dilakukan di semua tahapan proses audit, mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Observasi atau pengamatan awal merupakan langkah strategis dalam perencanaan audit, karena baik buruknya rencana audit sangat bergantung pada berhasil tidaknya observasi dalam mengumpulkan data dan informasi sebelum rencana tersebut disusun.

Di KAP, proses audit dapat disamakan dengan proses produksi di perusahaan manufaktur. Proses ini menggunakan berbagai sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, biaya operasional, dan lain-lain. Oleh karena itu, KAP mengelola proses audit secara profesional. Di satu sisi, hasil audit harus akuntabel dan independen. Di sisi lain, KAP tetap memperoleh keuntungan secara bisnis. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas dalam KKP tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap standar profesi, tetapi sebagai mekanisme pengendalian mutu untuk melindungi reputasi KAP di mata klien dan publik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa prinsip pertama akuntabilitas yaitu setiap KKP memiliki penanggung jawab jelas diterapkan melalui prosedur baku di KAP. Menurut (Sukrisno, A., & Trisnawati, 2019), kertas kerja pemeriksaan baik harus dilengkapi dengan informasi lengkap, antara lain nama perusahaan, nama akun, tahun buku, tanggal pembuatan, serta nama dan paraf pembuat dan memeriksa kertas kerja tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa setiap prosedur, temuan, dan kesimpulan audit dapat ditelusuri kembali kepada individu yang bertanggung jawab secara langsung. Dengan adanya kepemilikan jelas, tidak ada ruang bagi pekerjaan anonim yang sulit dipertanggungjawabkan.

Penanggung jawab KKP umumnya adalah auditor junior atau senior penyusun kertas kerja tersebut, wajib memastikan bahwa seluruh bukti transaksi berupa dokumen, berkas, invoice, catatan, dan lain-lain berasal dari klien telah dikumpulkan dan diolah dengan benar selama menjalankan aktivitas pemeriksaan. Sebelum proses audit dimulai, tim KAP melakukan observasi awal ke lokasi klien untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana audit. Dalam observasi ini, auditor perlu berkenalan dengan pihak manajemen, internal auditor, dan komite audit perusahaan klien, sekaligus memperkenalkan petugas yang akan terlibat dalam proses audit. Setiap anggota tim audit kemudian diberikan tanggung jawab spesifik pada area audit tertentu, dan setiap KKP yang dihasilkan wajib mencantumkan nama penyusun, tanggal pembuatan, serta paraf sebagai bukti kepemilikan. Praktik ini memudahkan proses review dan identifikasi kesalahan apabila terjadi kelemahan dalam prosedur audit.

Hasil pengamatan juga mengungkapkan bahwa mekanisme review berjenjang dari auditor junior, senior, hingga partner diterapkan secara sistematis di KAP sebagai instrumen pengendalian mutu. Menurut (Sukrisno, A., & Trisnawati, 2019), ciri-ciri kertas kerja yang baik antara lain disusun dengan rapi, bersih, jelas, dan mudah dimengerti oleh pihak lain yang membacanya, bukan hanya oleh penyusunnya sendiri. Proses review ini biasanya dimulai sejak tahap perencanaan, di mana supervisor KAP menugaskan auditor untuk pergi ke lokasi klien guna mengumpulkan data yang diperlukan. Selama proses audit berlangsung, setiap KKP disusun oleh

auditor junior akan diperiksa oleh auditor senior untuk memastikan kesesuaian bukti dengan tujuan audit, kelengkapan dokumen, serta konsistensi antar KKP. Selanjutnya, partner atau pimpinan tim audit melakukan review akhir mencakup evaluasi atas kesimpulan secara keseluruhan, signifikansi temuan, dan risiko audit secara komprehensif.

Dalam praktiknya, KAP memiliki reputasi baik cenderung menerapkan review berjenjang secara lebih ketat. Hal ini karena reputasi KAP terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan ketepatan waktu penyelesaian audit *audit delay* (Hermana, 2018). KAP dengan reputasi tinggi akan lebih mengutamakan kualitas hasil audit dibandingkan sekadar menghemat waktu dan biaya, mengingat reputasi merupakan aset paling berharga bagi perusahaan jasa profesional seperti KAP. Lebih lanjut, hasil pengamatan menunjukkan bahwa auditor bertanggung jawab penuh atas kesimpulan dalam KKP, dan tanggung jawab ini melekat baik secara personal maupun kolektif sesuai dengan level jabatan masing-masing. Menurut (Sukrisno, A., & Trisnawati, 2019), tujuan utama pembuatan kertas kerja untuk menunjukkan bahwa selama melaksanakan prosedur audit, auditor telah bekerja sesuai dengan kerangka aturan dan standar yang berlaku, di mana setiap proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional untuk memperkuat temuan dan opini audit.

Di KAP, proses pengambilan kesimpulan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung bukti. Auditor berpengalaman biasanya menyiapkan daftar periksa *checklist* untuk setiap wawancara dan observasi pertama mereka, sehingga tugas dapat berjalan efektif dan seluruh bukti telah terkumpul sebelum kesimpulan diambil. Tanggung jawab auditor atas kesimpulan ini menjadi semakin penting mengingat laporan keuangan yang telah diperiksa oleh KAP akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat. Apabila kesimpulan auditor kelak terbukti salah karena kelalaian dalam pengumpulan bukti atau ketidakcermatan analisis, auditor yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban profesional, baik melalui kode etik profesi maupun melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil pengamatan di KAP menegaskan bahwa penerapan akuntabilitas dalam KKP melalui tiga pilar tersebut merupakan praktik yang tidak terpisahkan dari budaya kerja profesional di KAP. Ketiga mekanisme ini saling terkait dan saling memperkuat: penanggung jawab yang jelas menciptakan rasa kepemilikan, review berjenjang menjaga kualitas, dan tanggung jawab atas kesimpulan melindungi integritas hasil audit. Dalam konteks KAP sebagai mitra strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan transparan dan akuntabel, penerapan akuntabilitas dalam KKP bukan sekadar formalitas prosedural. Ini adalah fondasi utama untuk menentukan kredibilitas profesi auditor di mata publik, klien, serta regulator seperti BPK dan Kementerian Keuangan.

### 3. KUALITAS PENYUSUNAN KKP SECARA KESELURUH

Kertas kerja audit merupakan dokumen yang disusun oleh auditor selama proses pemeriksaan laporan keuangan berlangsung. Dokumen ini berisi catatan mengenai prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang diperoleh, serta evaluasi auditor terhadap informasi keuangan yang diperiksa. Keberadaan kertas kerja audit sangat penting karena menjadi bukti bahwa proses audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Selain itu, kertas kerja audit juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan audit dan sebagai pendukung bagi auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang diperiksa.

Kualitas penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan adalah file yang dibuat dan dikumpulkan oleh auditor yang mencakup langkah-langkah audit, hasil yang diperoleh, uji coba, dan hasil akhir. KKP berfungsi untuk melindungi auditor dan menjadi bukti jika mereka menghadapi tuntutan hukum karena kesalahan atau Tindakan yang dianggap salah. KKP juga membantu memastikan bahwa semua informasi penting yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam laporan hasil audit. Pemeriksaan kesesuaian bukti mendukung Kualitas penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan adalah file yang dibuat dan dikumpulkan oleh auditor yang mencakup langkah-langkah audit, hasil yang diperoleh, uji coba, dan hasil akhir. KKP berfungsi untuk melindungi auditor dan menjadi bukti jika mereka

menghadapi tuntutan hukum karena kesalahan atau Tindakan yang dianggap salah. KKP juga membantu memastikan bahwa semua informasi penting yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam laporan hasil audit. Pemeriksaan kesesuaian bukti mendukung pelaksanaan prosedur audit yang telah dilakukan. Tinjauan KKP juga bertujuan untuk memastikan dari audit yang dilakukan.

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) merupakan alat yang krusial bagi auditor, sebab dokumen ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan catatan klien dengan hasil dari audit. KKP memiliki fungsi yang signifikan dalam proses audit karena berfungsi sebagai bukti tertulis dan dokumentasi yang mendukung aktivitas audit, termasuk temuan serta kesimpulan yang disimpulkan oleh auditor. KKP berkontribusi untuk menjamin bahwa proses audit dilaksanakan dengancara yang sistematis, konsisten, dan sesuai dengan standar yang ada.(C. R. Putri, 2025).

#### A. Karakteristik kertas Kerja Pemeriksaan adalah

Menurut Agoes & Trisnawati (2019), sebagaimana dikutip dalam Citralia, 2025, ada beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh kertas kerja pemeriksaan (KKP), antara lain:

1. Lengkap dan Tepat, KKP harus menunjukkan informasi yang menyeluruh dan tepat. Ini penting untuk mendukung temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan juga harus mencerminkan jenis serta ruang lingkup pengujian yang telah dilakukan.
2. Jelas dan Ringkas, KKP perlu di susun secara jelas dan padat. Dengan demikian, semua orang yang menggunakannya bisa mengerti tujuan, dan lingkup pekerjaan serta kesimpulan yang ada, tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut. KKP juga memiliki ringkasan, daftar isi, dan refrensi dari dokumen yang berhubungan.
3. Mudah Disusun, KKP harus gampang dibuat. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan jadwal organisasi, peralatan audit standar yang sudah ada, dan format KKP yang umum, yang bisa dibuat menggunakan database atau pengelola kata.
4. Mudah Dipahami dan Teratur, KKP harus simple dan mudah dimengerti. Jika tidak, perannya dalam membuat laporan akan terbatas, dan nilai bukti pemeriksaannya akan berkurang.
5. Informasi yang tepat, dalam kertas kerja harus focus pada hal-hal yang penting dan berguna sesuai dengan tujuan tugas.
6. Terstruktur dengan baik, kertas kerja harus disusun rapi dan mengikuti susunan yang jelas, yang bisa dibantu dengan daftar isi yang logis dan mudah dipahami. Semua dokumen pendukung perlu memiliki petunjuk yang menghubungkannya dengan kertas kerja yang relevan, serta rencana pemeriksaan, agar semua informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah.
7. Mudah untuk diperiksa, saat membuat kertas kerja, kita perlu selalu ingat bagaimana kertas kerja tersebut akan digunakan di akhir, termasuk sebagai dasar untuk hasil pemeriksaan dan saran, serta untuk memudahkan menjawab pertanyaan dari pihak yang berwenang.

#### B. Kertas Kerja Pemeriksaan yang Baik dan Teratur

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang baik dan teratur adalah dasar untuk meningkatkan keberhasilan audit. Ini karena kertas kerja tersebut membantu auditor untuk Menyusun bukti dengan cara yang masuk akal dan teratur. menurut farhat (2024), sebagaimana dikutip dalam anisa dan sari, (2025) ,melibatkan berbagai tipe dokumen, antara lain:

1. Program audit adalah dokumen yang menjelaskan secara lengkap langkah-langkah atau cara-cara audit yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
2. Daftar saldo kerja (Working Trial Balance) adalah dokumen yang mencakup rincian saldo dari akun-akun penting yang ada dalam laporan keuangan, termasuk saldo awal, transaksi yang terjadi selama periode audit, dan saldo akhir.
3. Ringkasan jurnal penyesuaian (adjustment) memuat catatan tentang semua penyesuaian yang harus dilakukan pada jurnal umum, baik untuk mencerminkan hasil

audit ataupun untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan akuntansi serta mencatat transaksi yang sebelumnya belum dimasukkan.

#### 4. Dokumentasi

Berikut adalah alasan mengapa dokumentasi yang baik bisa dianggap sebagai panduan saat membuat keputusan:

1. Memberikan data masa lalu yang jelas
2. Mengurangi bias pemikiran
3. Keterbukaan dan tanggung jawab
4. Mempercepat proses berbagi pengetahuan

#### C. Kertas Kerja Pemeriksaan

Berikut adalah alasan mengapa KKP sangat penting bagi kualitas akhir audit:

##### 1. Bukti pelaksanaan standar (Kepatuhan)

Auditor harus mengikuti standar profesi yang ada (seperti SPAP atau IIA standards). KKP menunjukkan bahwa auditor telah:

- Membuat rencana yang baik
- Menjalankan prosedur pengujian yang cukup
- Mendapatkan bukti audit yang memadai dan dapat diandalkan.

##### 2. Dasar penarikan kesimpulan

Kualitas akhir dari audit (opini atau saran) sangat dipengaruhi oleh ketajaman analisis dalam KKP.

KKP yang buruk: data yang kacau, tidak ada hubungan antar dokumen, jadi kesimpulannya bisa salah (risiko audit).

KKP yang baik: temuan didukung oleh bukti nyata, data diperiksa secara rinci (cross-reference), sehingga kesimpulannya objektif dan sulit untuk disangkal.

##### 3. Jembatan review (Pengendalian Kualitas)

Laporan audit biasanya melewati beberapa tahap (dari staf ke manajer hingga partner). KKP yang baik memungkinkan review untuk mengerti apa yang terjadi di lapangan tanpa perlu berada di sana.

## 4. PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP LAPORAN AUDIT

Laporan audit merupakan dokumen resmi yang resmi disusun oleh auditor setelah melakukan proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Laporan ini berisi hasil evaluasi auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam laporan audit, auditor menyampaikan opini atau pendapat profesional mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, bebas dari kesalahan material, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, laporan audit menjadi sarana komunikasi antara auditor dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen perusahaan, investor, kreditor, maupun pihak lain yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan (Maisyarah, 2019).

Agar laporan audit dapat menjalankan fungsi komunikasi tersebut secara kredibel, diperlukan suatu landasan teknis yang terstruktur selama proses pemeriksaan berlangsung. Landasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) memiliki peran krusial dalam proses audit karena menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan audit. Agoes dan Trisnawati (2019), sebagaimana dikutip dalam (C. R. Putri, 2025) menyebutkan bahwa KKP memiliki sejumlah karakteristik penting, antara lain kelengkapan, kejelasan, relevansi, serta kemudahan untuk direviu. Dari karakteristik tersebut, aspek kemudahan revidu sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. KKP yang dapat dengan mudah direviu memungkinkan auditor maupun pihak berwenang menelusuri prosedur, bukti, dan kesimpulan yang dihasilkan selama proses audit. Kondisi ini menjadikan proses audit lebih transparan karena dapat ditelusuri secara jelas, serta lebih akuntabel karena setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kemudahan revidu juga memastikan bahwa opini audit di susun berdasarkan bukti yang cukup dan relevan, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam laporan audit.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dalam KKP, semakin besar pula kredibilitas dan kualitas laporan audit yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik KKP yang mudah direviu tidak hanya meningkatkan efektivitas pemeriksaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan audit sebagai produk akhir yang dapat diandalkan.

Selanjutnya, untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, auditor membutuhkan bukti audit yang memadai sebagai dasar keyakinan. Bukti tersebut diperoleh melalui prosedur pengamatan, pemeriksaan, wawancara, dan konfirmasi, sehingga memberikan landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan audit. Kelayakan bukti ditentukan oleh dua aspek utama, yaitu kompetensi yang mencakup relevansi dan keandalan informasi serta kecukupan yang berkaitan dengan jumlah bukti yang tersedia. Apabila kedua aspek tersebut terpenuhi, auditor dapat menyusun laporan audit yang lengkap, objektif, akurat, dan meyakinkan bagi para pengguna laporan. Hal ini menegaskan bahwa auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan kompeten sebagai dasar yang sah untuk menyatakan pendapat, sehingga laporan audit yang dihasilkan berkualitas dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan demikian, opini audit yang akuntabel hanya dapat diberikan apabila didukung oleh bukti yang relevan dan memadai (Liza, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Sari dan Winarto (2020) melalui pengujian hipotesis parsial (uji t) menemukan bahwa bukti audit berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Temuan ini menegaskan bahwa auditor yang memiliki bukti sesuai standar dapat menghasilkan opini yang lebih kredibel. Oleh karena itu, bukti audit yang kompeten dan memadai tidak hanya menjadi dasar teknis dalam penyusunan opini, tetapi juga memperkuat akuntabilitas auditor serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan audit sebagai produk akhir yang dapat diandalkan (Sari & Winarto, 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sangat penting dalam mendukung transparansi proses audit melalui penyusunan yang teratur, dokumentasi yang lengkap, serta kemudahan akses informasi. Sedangkan akuntabilitas, tercermin dari adanya kejelasan tanggungjawab, mekanisme review berjenjang, dan pertanggungjawaban auditor atas setiap kesimpulan yang dibuat. Kedua aspek tersebut saling mendukung dalam meningkatkan kualitas penyusunan KKP. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama yang membantu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan audit, sehingga hasil audit dapat lebih dipercaya di kalangan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan artikel ini. Terima kasih disampaikan kepada instansi tempat penelitian ini dilakukan atas kesempatan dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan observasi serta memperoleh data yang diperlukan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing atas arahan, bimbingan dan masukan yang sangat berharga selama proses penulisan artikel penelitian ini. Selain itu penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga, dan teman-teman dan semua orang telah membantu menyelesaikan penulisan artikel ini berupa tenaga, dukungan dan materi. Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. A., Albab, U., & Kristyan. (2025). Efektivitas Implementasi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(6), 187–200. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1270>
- Farhat, R., & Munari. (2024). Penerapan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Op Schedule terhadap Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 234–243.
- Hermana, Y. (2018). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Auditor dan Reputasi KAP Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage di Bursa*

*Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016.*

- Liza, C. (2024). Penentu Kualitas Laporan Audit : Pentingnya Profesionalisme Dan Bukti Audit. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(5), 1092–1097. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jeps.v4i5.2101>
- Maisyarah, R. (2019). Pengaruh Penyusunan Kertas Kerja Audit Terhadap Kualitas Laporan Audit Bidang Instansi Pemerintah Pusat pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 85–97.
- Putri, C. R. (2025). *SKRIPSI TERAPAN PENERAPAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) ANALITIS DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan)*.
- Putri, S. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2025). Audit KKP Laporan Keuangan Puskesmas : Integrasi Akuntansi Terpadu Dan Pemeriksaan Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan*, 05(03), 546–550. <https://doi.org/10.47065/jamek.v3i1.2132>
- Sari, A. R., & Winarto, H. (2020). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN BUKTI AUDIT TERHADAP OPINI AUDIT (Studi Empiris di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur). *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v7i1.374> PENGARUH
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2019). *Praktikum audit: instruksi umum, berkas permanen, permasalahan, dan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu*. Salemba Empat.
- Vica, M., & Budiwitjaksono, G. S. (2025). PENERAPAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ( KKP ) ATLAS DALAM PROSES AUDIT LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Media Mahardika*, 24(1), 79–86.